



<b>News Title :</b> Total Transaksi Kripto Hingga Maret Rp 158,84 Triliun	
<b>Media Name :</b> Neraca	<b>Journalist :</b> bani
<b>Publish Date :</b> 14 May 2024	<b>Tonality :</b> Positive
<b>News Page :</b> 1	<b>News Value :</b> 30,750,000
<b>Resources :</b> Hasan (Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti))	<b>Ads Value :</b> 10,250,000
<b>Section/Rubrication :</b> Halaman Depan	<b>Topic :</b> Transaksi Kripto

## Total Transaksi Kripto Hingga Maret Rp158,84 Triliun

### NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total akumulasi nilai transaksi aset kripto sejak awal tahun 2024 hingga Maret 2024 tercatat senilai Rp158,84 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (IT-SK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi menyebutkan, nilai transaksi aset kripto pada Maret 2024 saja tercatat sebesar Rp103,58 triliun atau naik signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp33,69 triliun.

Sedangkan dari sisi investor, OJK mencatat jumlah total investor aset kripto mencapai 19,75 juta investor per Maret 2024 atau mengalami peningkatan 570 ribu investor dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 19,18 juta investor. "Dapat disampaikan bahwa jumlah investor dan juga transaksi terkait aset kripto di domestik terus menunjukkan tren

peningkatan. Saat ini Indonesia tercatat berada di peringkat ketujuh sebagai negara dengan jumlah investor aset kripto terbesar di dunia," ujarnya secara virtual di Jakarta, kemarin.

Terkait pengawasan aset kripto, Hasan menyampaikan pihaknya akan membentuk tim transisi dalam rangka peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK. Dalam melaksanakan tugas fungsi peralihan aset keuangan digital, termasuk aset kripto serta derivatif keuangan, OJK akan bertindak sebagai koordinator dan akan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Bappebti dalam membentuk dan melaksanakan tugas serta fungsi tim transisi.

Hasan mengatakan, OJK juga tengah menyusun cyber security guideline yang akan diterapkan di

sektor IAKD, termasuk untuk aset kripto. Guideline ini, kata Hasan, akan menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara ITSK dalam menyusun dan mengimplementasikan kerangka ketahanan dan keamanan siber di sektor IAKD. Selanjutnya, OJK juga terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan digital, penguatan ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan, serta praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, khususnya terkait dengan penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di sektor ITSK.

Terkait dengan penerapan AI, OJK juga saat ini sedang merumuskan kebijakan yang terkait dengan penerapan teknologi tersebut di sektor keuangan, termasuk untuk sektor ITSK, dengan berkolaborasi lebih lanjut dengan kementerian maupun lembaga dan asosiasi terkait lainnya. Sebelumnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

(Bappebti) menargetkan pertumbuhan transaksi kripto sepanjang 2024 akan meningkat setidaknya ke posisi yang sama seperti tahun 2021, yaitu sebesar Rp 859,4 triliun.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti, Tirta Karma Senjaya pernah mengatakan, pihaknya menargetkan transaksi aset kripto Indonesia akan kembali setidaknya pada posisi yang sama pada 2021. Hal tersebut juga didukung oleh momentum halving day. "Transaksi kripto itu seperti kurva U, transaksi 2022 dan 2023 sudah turun, jadi 2024 seharusnya bisa naik," ujarnya.

Berdasarkan data Bappebti tercatat adanya 18,51 juta investor aset kripto di Indonesia sepanjang 2023. Posisi tersebut meningkat 9,8% sejak awal tahun. Transaksi aset kripto pun mencapai angka Rp 149,25 triliun. Meski terjadi penurunan transaksi dari Rp306,4 trili-

un pada 2022 (yoy), industri ini tetap menunjukkan potensi ekonomi yang kuat.

Hingga saat ini, ada 501 aset kripto yang resmi terdaftar, dan 33 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAD) yang terdaftar dan teregulasi. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang aman, adil, dan mendorong inovasi ekonomi.

Tujuannya tidak hanya untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang aman dan terpercaya, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara di Asia tengah gencar bersaing untuk menjadi pusat pengembangan teknologi kripto, dan Indonesia tidak ketinggalan dalam perhelatan ini.

"Perdagangan aset kripto dapat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat, menciptakan, dan mendorong upaya pengembangan ekonomi digital Indonesia," kata Tirta.  bani